

**PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DESA**

(Studi Kasus Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Studi Strata 1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh :

AVITA STEVANI

20.22.0016

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

202

HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Avita Stevani
Nim : 20.22.00016
Program Studi : SI AKUNTANSI
Judul : PENGARUH GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA. (Studi
Kasus Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)

Disetujui dan disahkan :

Hari : ..Selasa.....

Tanggal : ..23 April 2024.....

Pembinbing,



Eko Triyanto, S.E., M.M

NIDN.021704860

Mengetahui,

Wakil Ketua I



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M

NIDN.0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Avita Stevani
Nim : 20220016
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : PENGARUH GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA. (Studi
Kasus Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)

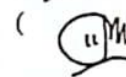
Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Akuntansi

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 30 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua : Eko Triyanto, S.E.,M.M, M.Ak
Anggota : Arif Nugroho Rachman, S.E.,M.M.

Tanda Tangan

()
()

Mengetahui,



Dr. Budi Suryanto, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DESA. (Studi Kasus Di Kecamatan Colomadu
Kabupaten Karanganyar)**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat kesuluruhan atau sebgaiian tulisan orang lain yang saya akui scolah-olah sebgaiia tulisan saya sendiri tanpa memeberikan pengakuan pada penulis aaslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 23 April 2024

Yang memberi pernyataan



Avita Stevani

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha pengasi lagi Maha Penyanyang, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul Pengaruh **Good Government Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)**.

Selanjutnya pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagi pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasi kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto S.E., M.M., M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si. selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Bapak Ismunawan, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Bapak Eko Triyanto S.E., M.M. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan saat proses pembuatan proposal skripsi ini. Dan yang telah sabar memberikan masukan dan motivasi, serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini agar cepat lulus.
5. Seluruh Dosen Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Teruntuk Kedua Orang Tua yang telah memberikan doa dan semangat yang tiada hentinya demi masa depan anaknya.
7. Teruntuk keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat untuk penulis.
8. Teruntuk teman-teman Kelas Akuntansi R2 A dan teman sebangkuan yang telah memberikan motivasi.
9. Sahabat penulis yaitu grub Kerja Kuliah Nongkrong (KKN) antara lain Alechia, Natalia, Indah, Shafira, Vadila dan Widya yang merupakan sesame

pejuang skripsi yang selalu mendengarkan keluhan dan saling memberikan semangat tanpa henti.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Untuk itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan laporan ini.

Surakarta, Mei 2024

Penulis



Arita Stevani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRAC.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN DAN MANFAAT MASALAH.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. LANDASAN TEORI.....	6
B. PENELITIAN TERDAHULU.....	17
C. KERANGAKA PIKIR.....	23
D. HIPOTESIS.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. OBJEK PENELITIAN.....	25
B. JENIS DAN SUMBER DATA.....	25
C. POPULASI DAN SAMPEL.....	26
D. OPERASIONAL VARIABEL.....	27
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	29
F. TEKNIK ANALISIS DATA.....	30
G. PENGUJIAN HIPOTESIS.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	37

B. KARAKTERISTIK RESPONDEN	39
C. STATISTIK DESKRIPTIF	Error! Bookmark not defined.
D. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS.....	42
E. ANALISIS ASUMSI KLASIK	44
F. ANALISIS HIPOTESIS	49
G. PEMBAHASAN.....	53
BAB V PENUTUP	58
A. SIMPULAN	58
B. SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel.....	28
Tabel 4.1 Jenis Kelamin	39
Tabel 4.2 Jabatan.....	40
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.6 Uji Normalitas	45
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi	46
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4.9 Uji heteroskedastisitas	47
Tabel 4.10 Uji regresi Linear Berganda	49
Tabel 4.11 Uji T	51
Tabel 4.12 Uji F.....	52
Tabel 4.13 Uji R Square	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1 Peta kecamatan Colomadu	37
Gambar 4.2 P-plot.....	45
Gambar 4.3 Scatterplot	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner penelitian

Lampiran 2. Daftar Responden

Lampiran 3. Karakteristik Responden

Lampiran 4. Uji Karakteristik Responden

Lampiran 5. Lampiran Uji Deskriptif

Lampiran 6. Uji Normalitas

Lampiran 7. Lampiran Uji AUTOKORELASI

Lampiran 8. Uji MULTIKOLINIERITAS

Lampiran 9. Uji HETEROKEDASTISITAS

Lampiran 10. Uji ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA (Uji T, F, KOEFISIEN DETERMINASI)

ABSTRAK

PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS KECAMATAN COLOMADU)

Oleh :

Avita Stevani

20220016

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Good Government Governance* terhadap kinerja Pemerintah Desa. Variabel *good government governance* direfleksikan dengan variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Objek pada penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Desa di Kecamatan Colomadu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Pengambilan Data penelitian menggunakan kuisioner terhadap 66 orang pegawai. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 25.0 dengan menggunakan metode analisis data berupa uji statistik deskriptif, uji validitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, analisis regresi berganda dan uji hipotesis yaitu uji T, uji R dan uji F. Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil bahwa Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Colomadu. Hasil dari pengujian secara simultan dengan uji F menjelaskan bahwa variabel *Good Government Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Colomadu.

Kata Kunci : Good Government Governance, Kinerja Pemerintah Desa

ABSTRAC

THE INFLUENCE OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE ON VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE (CASE STUDY COLOMADU DISTRICT)

By :

Avita Stevani

2020016

The purpose of this study is to ascertain how village government performance is affected by good governance. The variables Participation, Accountability, and Transparency reflect the good governance variable. Employees of the Village Government in the Colomadu District are the subjects of this investigation. Purposive sampling was used as the method of sampling. Questionnaires were used to collect data for the research for 66 employees. The descriptive statistical tests, validity tests, classical assumption tests with normality tests, multicollinearity tests, autocorrelation tests, multiple regression analysis, and hypothesis tests—the T, R, and F tests—were applied to the data during the SPPSS version 25.0 testing process. Transparency, accountability, and participation had a positive and significant impact on the performance of the Village Government in the Colomadu District, according to the results, which were partially analyzed with the t test. The Good Governance Government variable has a positive and significant effect on the performance of the Village Government in Colomadu District, as demonstrated by the results of simultaneous testing and the F test.

Keywords: Good Government Governance, Village Government Performance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan kewenangan pemerintahan desa, dan memenuhi kebutuhan masyarakat di desa tempatnya bekerja. Seorang kepala desa mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Dalam menjalankan kewenangannya, seorang kepala desa tetap harus menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa memegang peranan penting dalam pelaksanaan program pemerintah desa. Sumber daya manusia organisasi pemerintah desa harus mampu berkinerja baik agar dapat mencapai keberhasilan organisasi dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Karyawan yang berkomitmen terhadap tujuan perusahaan akan berkinerja baik dan berkontribusi terhadap pencapaiannya.

Tata kelola yang baik secara umum berdampak pada kinerja pegawai. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik memandu pemerintahan. Partisipasi masyarakat, menjunjung tinggi supremasi hukum, transparansi, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis merupakan komponen pengelolaan pemerintahan yang baik (Yudhasena dan Putri, 2019).

Istilah “kinerja” dan “kinerja aktual” (prestasi kerja atau prestasi

aktual yang dicapai seseorang) merupakan sinonim. Kinerja, disebut juga “prestasi kerja”, mengacu pada kualitas dan kuantitas pekerjaan seseorang ketika ia memenuhi tugas yang diberikan kepadanya. (2019, Yudhasena dan Putri) “adanya kepala desa yang menyalahgunakan dana tanah kas desa untuk kepentingan pribadi (soloraya.solopos.com 2023)” merupakan fenomena terkait kinerja pemerintah desa di Kecamatan Colomadu. Fenomena tersebut terkait dengan prinsip Good Government Governance yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Kinerja pemerintah desa dapat bertanggung jawab dalam mengelola dana dan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dalam menjalankan suatu proses kegiatan di pemerintahan desa. Menurut penelitian I Gede Iswara Yudhasena, terdapat sejumlah permasalahan pada kinerja pemerintahan desa di masa lalu. A. M. Temuan penelitian Asri Dwija putri (2019) di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa efektivitas kinerja pemerintah daerah meningkat ketika Organisasi Perangkat Desa (OPD) menerapkan tata kelola pemerintahan yang sehat. Eksplorasi lainnya dipimpin oleh Ni Gusti Putu Wirawati, I Dewa Nyoman Badera, I. G. A. M. Pengendalian internal pada Organisasi Perangkat Desa (OPD) berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, menurut penelitian yang dilakukan di Kabupaten Karangasem oleh Asri Dwija Putri (2020). Dalam penelitiannya di Kabupaten Sleman (2020), Bambang Jatmiko menemukan bahwa transparansi mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Namun penelitian mengenai kinerja aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas pernah dilakukan oleh Sunarmo dkk. (2018). Temuan mereka menunjukkan bahwa pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap kinerja perangkat daerah di daerah tidak signifikan.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan terdapat perbedaan hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan di dalam judul “ PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PMERINTAH DESA (Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa ?
3. Apakah Partisipas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Desa
- b. Untuk menganalisis pengaruh Transparansi terhadap kinerja Pemerintah Desa
- c. Untuk menganalisis pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan serta informasi baru bagi aparat desa dan masyarakat agar lebih maksimal dalam penerapan *Good Government Governance* untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa.

b. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menambah pengetahuan dalam mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan, pengetahuan baru untuk referensi dan perbandingan bagi penelitian yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Menurut teori keagenan, hubungan kontraktual terjadi di mana satu atau lebih individu (prinsipal) mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik bagi prinsipal dan menginstruksikan orang lain untuk melakukan layanan atas nama mereka. Dalam konteks organisasi sektor publik, Marsmo (2016) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang kepercayaan—pemerintah—untuk memberikan pertanggungjawaban, memberikan laporan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi kepercayaan—masyarakat— siapa yang berhak meminta pertanggungjawaban. Pandangan Mardiasmo mengenai akuntabilitas sektor publik menegaskan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan daerah terdapat hubungan keagenan (agency theory) antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. (Teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi, yang meliputi)

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mementingkan diri sendiri, tidak rasional, dan enggan mengambil risiko.

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi organisasi antara lain adanya konflik antar anggota, efisiensi sebagai ukuran produktivitas, dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi ialah informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bias diperjual belikan.

Hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini ialah pemerintah desa sebagai (agent) berkewajiban memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, dan mengungkapkan semua kegiatan dengan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat (prinsipal) (Wardoyo,2021). Maka dari itu, teori ini memiliki hubungan antara *Good Government Governance* dan transparansi yang merupakan sebuah kontrol untuk dapat mencegah terjadinya asimetris informasi yang nantinya memiliki peluang sebagai seseorang maupun sekelompok untuk dapat melakukan tindakan *fraud*.

2. *Good Government Governance*

“Tata kelola pemerintahan yang baik” adalah suatu proses yang menekankan bagaimana suatu organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan menumbuhkan masyarakat sipil. Aspek lain dari tata pemerintahan yang baik adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara secara terbuka, transparan, akuntabel, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(2018, Tullah) Hasibuan 2022 mengartikan “Good Government Governance” sebagai kemampuan organisasi dalam menghilangkan nepotisme, kolusi, dan korupsi dengan memberikan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip pendiriannya.

Ciri utama Good Government Governance adalah bagaimana kekuasaan dan wewenang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Dalam situasi tersebut, perlu dilakukan mekanisme pengendalian yang disebut check and balance agar tidak ada satu pihak pun yang tidak mempunyai kekuasaan penuh. Sebagaimana dibuktikan oleh perilaku atau budaya tempat kerja, antara lain, akuntabilitas staf atas tanggung jawab, fungsi, dan tugasnya ditegakkan melalui sistem, struktur, organisasi, dan cara lainnya.

Kami menyimpulkan dari interpretasi bahwa prosedur dan hasil mengukur tata kelola yang baik. Seluruh unsur pemerintahan harus dapat bekerja sama tanpa menimbulkan konflik satu sama lain, memperoleh dukungan masyarakat, dan melibatkan seluruh pihak dalam rangka mengambil kebijakan publik, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan membangun sistem pemerintahan yang baik. masyarakat sipil. Pemerintahan yang baik dalam pemerintahan akan tercapai jika prinsip-prinsip ini berhasil diterapkan. Penelitian mengenai good governance sebagaimana dikemukakan oleh Setyawan dan Putri (2013) memberikan bukti empiris bahwa variabel good governance mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana aparatur desa diorganisir.

Adapun manfaat dari penerapan *Good Government Governance* terhadap pemerintah desa ialah :

- a. Meningkatkan efesien dan produktivitas
- b. Meningkatkan kepercayaan publik
- c. Menjaga kelangsungan pemerintahan dapat mengukur target kinerja pemerintah

Selain itu, gambaran administrasi publik yang bercirikan good governance dapat dilihat dari komponen utama atau prinsip-prinsip pedoman Good Government Governance sebagai berikut:

- a. Istilah "tanggung jawab", juga dikenal sebagai "akuntabilitas", mengacu pada fakta bahwa para pengambil keputusan di organisasi yang beroperasi di sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada masyarakat umum.
- b. Setiap warga negara, masyarakat, dan individu, laki-laki dan perempuan, mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.
- c. Transparansi atau tata pemerintahan yang baik akan transparan bagi masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
- d. Negara hukum atau good governance ditandai dengan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik.
- e. Kemampuan beradaptasi: setiap lembaga dan prosedurnya harus melayani berbagai pemangku kepentingan.
- f. Kesetaraan (juga dikenal sebagai keadilan): Pemerintahan yang baik akan memberikan banyak kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar hidup mereka.

a. Akuntabilitas

Kata “akuntabilitas” berasal dari kata bahasa Inggris “accountability” yang berarti “tanggung jawab” atau “keadaan dimintai pertanggungjawaban”. Dalam konteks operasional bisnis atau pemerintahan, akuntabilitas mengacu pada pemenuhan tugas dan wewenang masing-masing komponen.

Akuntabilitas, sebagaimana didefinisikan oleh Lenny (2015):57, berarti menanggapi pertanyaan dari pihak-pihak yang berwenang meminta informasi atau pertanggungjawaban serta memberikan penjelasan atas tindakan dan kinerja individu, badan hukum, dan pimpinan organisasi. Asmawanti dkk.

Tahun 2020 mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban menerima tanggung jawab atas tercapai atau tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan dan target yang ditetapkan melalui mekanisme akuntabilitas yang diberlakukan secara berkala. Pemerintahan yang akuntabel akan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya kepada masyarakat (A. 2020, “Wahyudi”

Manfaat akuntabilitas untuk pemerintah desa antara lain :

- a. meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa

- b. Adanya kesadaran masyarakat tentang hak
- c. Untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa
- d. Sebagai alat ukur keberhasilan kerja dan alat untuk mengevaluasi kerja.

Jenis akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu, antara lain :

- a. Akuntabilitas vertikal berarti setiap pejabat publik bertanggung jawab atas peningkatan kinerja atau hasil kegiatan yang sering atau sewaktu-waktu dilakukan di hadapan atasan langsungnya.
- b. Akuntabilitas horizontal artinya setiap lembaga masyarakat bertanggung jawab atas seluruh tugas yang diterima, dilaksanakan, dan dikomunikasikan kepada pihak lain, seperti lingkungan hidup dan dunia luar.

b. Transparansi

Kata “transparan” yang berarti “jelas”, “nyata”, dan “terbuka” merupakan akar kata “transparansi”. Menurut Putra (2017), transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau kebebasan informasi. Menurut Suwanti dan Hermanto 2020, transparansi merupakan kegiatan yang berdampak pada kepentingan publik dan harus diketahui dengan mudah dan terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat

Gagasan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memahami secara utuh dan terbuka kinerja pemerintah dalam mengelola sumber

daya yang dipercayakan kepadanya, kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 71), dan penyediaan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. adalah landasan transparansi.

Menurut (Yanto and Aqfir 2020), transparansi adalah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan agar masyarakat memahami dan mempunyai akses terhadap informasi seluas-luasnya. (Jatmiko 2020) berpendapat bahwa transparansi dalam kegiatan urusan publik (salah satunya bidang pengelolaan keuangan) dapat mendorong pengawasan terhadap pemerintah.

Melalui transparansi, penyelenggara pemerintahan dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam pemerintahan, termasuk kebijakan yang akan atau sudah diambil dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Administrasi urusan publik yang terbuka akan memudahkan pemantauan operasional pemerintah.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi dalam kinerja Pemerintah Desa :

- a. Upaya meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah
- b. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan penyelenggara pemerintah yang baik
- c. Meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah

Dalam Simson Werinom, Mardiasmo menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan transparansi penyusunan anggaran, lima syarat harus dipenuhi:

- a. pengumuman mengenai kebijakan anggaran sudah tersedia.
- b. Dokumen anggaran mudah diakses
- c. Akses tepat waktu terhadap laporan akuntabilitas; dan Pemikiran dan pendapat masyarakat dipertimbangkan.
- d. Tersedianya sistem penyebaran informasi publik.

Sementara itu, Warren Bennis menegaskan bahwa transparansi bertujuan agar setiap program atau kegiatan dapat diakses oleh masyarakat, mempermudah akses informasi, serta menumbuhkan kepercayaan dan kerja sama antar pemangku kepentingan dan manajemen.

c. Partisipasi Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “partisipasi” sebagai tindakan ikut serta atau mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Menurut Dr., ketika satu orang atau lebih ikut serta dalam suatu kegiatan, maka Pidarta disebut partisipasi.

Karena masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam pemerintahan daerah, maka didorong untuk melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. Apabila masyarakat tidak aktif mengkomunikasikan tujuannya, maka perkembangan suatu daerah akan terhambat.

tidak tersebar dimana-mana (Yanto dan Aqfir, 2020). Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Partisipasi berarti setiap orang atau anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai suara yang setara dalam bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan, baik secara langsung maupun di bawah arahan perwakilan Lembaga, sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing. .

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi menurut Tumbel (2017). Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Karakteristik individu yang memotivasi seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan dikenal dengan faktor internal. Usia, tingkat pendidikan, ukuran keluarga, dan total pendapatan merupakan beberapa karakteristik.
- b. Jasa pengelolaan kegiatan yang positif juga didukung oleh faktor eksternal, seperti terjalinnya hubungan yang berkelanjutan antara pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.

3. Kinerja

Pekerjaan yang mempunyai kaitan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan, dan pemberian kontribusi finansial akan menghasilkan kinerja (D. Yusup, Wahyudi, dan Marantika)

Menurut Sarmigi (2020), produktivitas kerja dapat diartikan sebagai proses aktivitas terstruktur untuk mengevaluasi potensi suatu produk dan ukuran keberhasilan dalam mengelola dan mengoperasikan suatu organisasi. Kinerja merupakan salah satu faktor produktivitas dalam bekerja. Kata “produktif” yang mengacu pada sesuatu yang berpotensi, merupakan akar kata “produktivitas”. Kapasitas pegawai dalam menggarap potensi kerja di masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor pribadi maupun faktor tempat kerja. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa antara lain:

- a. Efisiensi adalah perbandingan masukan terhadap keluaran terhadap tujuan dan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Sejauh mana suatu program mencapai tujuannya merupakan ukuran efektivitasnya.
- c. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana nilai masukan dibandingkan dengan nilai yang dinyatakan dalam satuan moneter.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan penelitian ini memanfaatkan teori-teori yang sudah ada, maka penelitian-penelitian sebelumnya harus dikaji ulang. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan pendukung dan pelengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variable	Hasil
1	Gita Saputro	2021	Pengaruh Prinsip Pengendalian Internal dan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Tambaksari	Variable Bebas : pengendalian internal, good governance Vraiabel Terikat : Kinerja pegawai	Hasil pengujian menunjukkan bahwa pegawai Kantor Kecamatan Tambaksari Surabaya mempunyai kinerja yang lebih baik jika prinsip-prinsip tata kelola yang baik dipatuhi.
2	Indriana Muhammad Nasrun	2019	Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Variable Bebas : Good Government Governance Variable Terikat : Kinerja Pemerintah	Hasil pengujian bahwa good governance berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten

			Pangkejen Dan Kepulauan		Pangkajene dan Kepulauan.
3	I Gede Iswara Yudhasena Ig.A.M. Asri Dwuja Putri	2019	Pengaruh Interkontrol, Budaya Organisasi, dan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Variable Bebas : Good Government Governance, Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi Variable terkait : kinerja perangkat daerah	Dapat disimpulkan bahwa penerapan Good Government Governance yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan efisiensi Pemerintahan Daerah kinerja Kabupaten Karangasem.

4	Sopia seri wahyuni	2019	Pengaruh pengendalian internal, Good Government Governance , dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai keuangan pemerintah	Variabel Bebas : pengendalian intern, Good government governance , dan komitmen organisasi Variabele Terikat : Kinerja pegawai keuangan pemerintah	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendalian intern, good government governance dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten kampar
5	Agus Sunarmo Rini Widianingsih Umi partiwi Taufik Hidayat	2018	Penerapan Prinsip-prinsip Good Government Governance, Sitem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetisi SDM Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Variabel Bebas : Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Variable Terikat : Kinerja Apartur	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahawa Penerpan Prinsip-prinsip <i>good government governace</i> .

6	Risal Rumlolas	2018	Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja pegawai satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Seram bagian Timur Provinsi Maluku	Variabel Bebas : pengaruh Good Governance Variabel Terikat : Kinerja perangkat daerah	Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan good governance berpengaruh terhadap kinerja pegawai satuan kerja perangkat daerah, yang memiliki arti bahwa dengan tingginya penerapan prinsip-prinsip good governance, maka dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam sebuah instansi.
7	I Putu Novan Anggayana I Gede Ary Wurajaya	2019	Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kta Denpasar	Variable Bebas : Prinsip-prinsip Good Governance Variabel Terikat : Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan	Hasil dari penelitian ini bahwa hasil dari uji F yaitu bahwa prinsip-prinsip Good government governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar.
8	Mahyudin, Sahri	2022	Implementasi Prinsip-prinsip Good	Variabel bebas : Prinsip Good Governance	Berdasarkan hasilnya bahwa Good governance

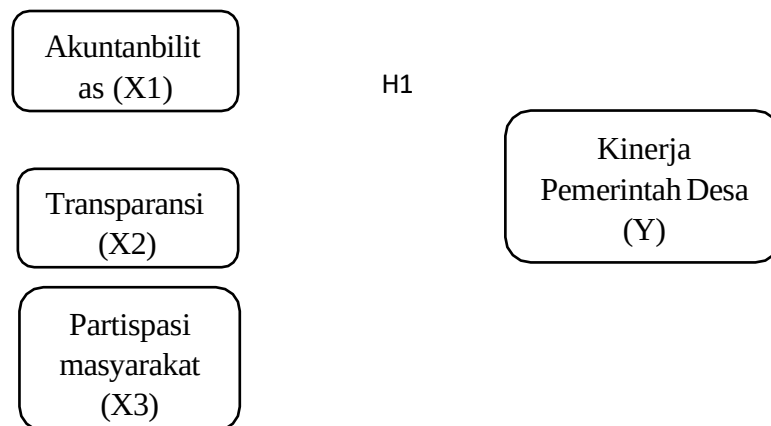
			Governance dan dampaknya terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Variabel Terikat : Kinerja aparatur pemerintah daerah	menunjukkan bahwa koefisien memiliki hubungan yang searah dengan kinerja aparatur pemerintah daerah, sehingga mengandung arti jika prinsip-prinsip good governance dapat diimplementasikan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.
--	--	--	--	---	---

9	Ni Gede Putu Wirawati I Dewa Nyoman Badera I.G.A.M Asri Dwija Putri	2020	Good Governance, Internship, dan Tricia Karama pada Organisasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem	Variable Bebas : Good government governance, Pengendalian intern, Budaya Tri Hita karana Variable Terikat: Kinerja Organisasi Pemerintah daerah	Dasarka artikel ini adalah 1) Organisasi Pembangunan Publik (OPD) melaksanakan good governance yang positif untuk kepentingan Majelis Rakyat Kabupaten Karangasem. 2) Magang di Organisasi Pengendalian Hari (OPD) memberikan hasil yang positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. 3) Tri hita karan di Pengembangan Organisasi (OPD) membuahkan hasil yang positif karena efektivitas Pemerintahan Kabupaten Karangasem
---	---	------	--	---	---

Terdapat keterhubungan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu berdasarkan kesimpulan penelitian terdahulu. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk tata kelola yang digunakan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi untuk meningkatkan kinerja pegawai baik di dunia usaha maupun pemerintahan. Pemilihan lokasi dan metode pelaksanaan inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Pikir

Bagian utama suatu penelitian adalah dasar pemikirannya, yang membantu orang memahami cara kerja suatu teori dan aspek penting lainnya dari judul penelitian. Oleh karena itu, penulis penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan tanggapan sementara terhadap pertanyaan rumusan masalah. Melalui pengumpulan data dan analisis data penelitian, hipotesis harus diuji untuk menunjukkan kebenarannya. Dari hipotesis tersebut peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa.

Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Penerapan akuntabilitas, menurut Aheruddin (2008), akan menghasilkan kinerja yang baik dan mencerminkan kepentingan serta harapan masyarakat daerah secara ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Karena akuntabilitas merupakan akuntabilitas langsung, maka kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh akuntabilitas. Salah satu prinsip tata kelola yang baik adalah akuntabilitas. Kajian yang lalu (Abdallah 2018) menunjukkan bahwa tanggung jawab berdampak pada kinerja pemerintahan kota

H1: Kinerja Pemerintahan Desa Dipengaruhi oleh Akuntabilitas.

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa.

Salah satu prinsip pemerintahan yang baik adalah transparansi. Tata Kelola. Kinerja setiap orang akan meningkat akibat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih terbuka

kegiatan, terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat (Making and Handayani 2021) .

Menurut penelitian Mardiasmo (2009) sebelumnya, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan terpengaruh jika transparansi diterapkan.

H2: Kinerja Pemerintahan Desa Dipengaruhi oleh Transparansi

3. Pengaruh Partisipasi Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam penerapan prinsip-prinsip good governance karena good governance mempunyai dua arti: pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan masyarakat. masyarakat dan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan, seperti keadilan sosial. Kedua, bagian pemerintah yang benar-benar melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Lay 2022). Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian Wahyuni 2019 yang menemukan bahwa kinerja manajerial perangkat desa meningkat ketika mereka berpartisipasi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Karena dengan adanya hubungan partisipasi, maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja dari pemerintah tersebut.

H3 : Partisipasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemrintah Desa

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mengingat akibat pembicaraan di bagian lampau, cenderung ditutup sebagai berikut.

- 1) Pemerintahan desa di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar meningkat secara signifikan melalui akuntabilitas parsial.
- 2) Kinerja pemerintah desa di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar meningkat signifikan dengan adanya transparansi parsial.
- 3) Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, partisipasi parsial berpengaruh signifikan dan menguntungkan terhadap kinerja pemerintahan desa.

B. Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan pembahasan temuan dan kesimpulan:

- 1) Bagi Pemerintah Desa

Dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa bahwa variabel Good Government Governance berpengaruh terhadap kinerjanya. Dengan demikian, diharapkan kedepannya

dapat lebih memaksimalkan lagi sistem tata kelola pemerintahan (Good Government Governance) agar dapat lebih menambah kesejahteraan, kemakmuran, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa yang ada di Kecamatan Colomadu.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Dengan menggunakan variabel-variabel tambahan yang tidak dimasukkan dalam model penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor tambahan yang diyakini dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Zachari. 2018. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahvDaerah Kabuoaten Kerinci." *Economac Vol 2 Issue 1*.
- Asmawanti, Dri, Aisyah Mayang Sari, Vika Fitranita, and Indah Oktari Wijayanti. 2020. "Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah." *Journal of Applied Accounting and Taxation* 5 (1): 85–94.
- Ghozali, Imam. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro." *Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 490.
- Hasibuan, Nur Fadhillah Ahmad. 2022. "Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra* 3 (4): 183–95.
- Jatmiko, Bambang. 2020. "Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (2): 231–46.
- Kumalasari, Desy Ramadhan, and Tituk Diah Widajantie. 2022. "Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarsakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandono." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22 (2): 1116–22.
- Lay, Marthina Raga. 2022. "Partisipasi Masyarakat Sebagai Salah Satu Pilar Dalam Mewujudkan Good Governance." *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10 (1): 517–24.
- Mafruhah, Lailatul, and Siti Sundari. 2023. "Determinan Kinerja Pemerintah Desa Sidobinangun Kabupaten Lamongan." *Journal of Management and Bussines (JOMB)* 5 (2): 1658–70.
- Making, Andreani Avellyni Leda, and Nur Handayani. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10 (10).
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, and Manajemen Keuangan Daerah. 2016. "Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004." *Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi*.
- Puspitasari, BENING. 2020. "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kemampuan Kerja,

- Budaya Organisasi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Srimartani Kecamatan Piyungan).” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 3: 1–20.
- Putra, Hendi Sandi. 2017. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri.” *Jurnal Politik Muda* 6 (2): 110–19.
- Sarmigi, Elex, and Maryanto Maryanto. 2020. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.” *Jurnal Apresiasi Ekonomi* 8 (1): 153–62.
- Setyawan, Komang Meitradi, and IGAMAD Putri. 2013. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Pekreditan Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.” *E-Jurnal Akuntansi* 5 (3): 586–98.
- Sunarmo, Agus Sunarmo, Rini Widianingsih Widianingsih, Umi Pratiwi Pratiwi, and Taufik Hidayat Hidayat. 2018. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.” *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 16 (1): 9–18.
- Suwanti, S, and S B Hermanto. 2020. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.” *Jurnal Ilmu Dan ...*, 1–21. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3621/3637>.
- Tullah, Dewi Sarifah, Erma Apriyanti, and Nanang Wijaya. 2018. “Pengaruh Penerapan Good Government Governance (Ggg) Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat Dan Banten).” *Balance Vocation Accounting Journal* 2 (1).
- Wahyudi, Agus. 2020. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Manajerial Perangkat Desa Di Kabupaten Sumbawa.” *Journal of Accounting, Finance, and Auditing* 2 (1): 65–85.
- Wahyudi, Dedy, Abshor Marantika, and Yusup Yusup. 2022. “Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Fasilitas Kantor Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kampar.” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5 (1): 887–98.
- Wahyuni, Sopia Seri. 2019. “Pengaruh Pengendalian Internal, Good Government Governance, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Keuangan Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar).” Universitas Islam Riau.

- Wardoyo, Dwi Urip, Rafiansyah Rahmadani, and Putut Tri Hanggoro. 2021. "Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1 (1): 39–43.
- Yanto, Edi, and Aqfir Aqfir. 2020. "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa." *Economy Deposit Journal (E-DJ)* 2 (2).
- Yudhasena, I Gede Iswara, and IGAMAD Putri. 2019. "Javascript:Void(0)Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)." *E-Jurnal Akuntansi* 28 (1): 434–64.

HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN

Nama : Avita Stevani
Nim : 20.22.00016
Program Studi : S1 AKUNTANSI
**Judul : PENGARUH GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA. (Studi
Kasus Di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)**

Disetujui dan disahkan :

Hari :

Tanggal :

Pembinbing,

Eko Triyanto, S.E., M.M

NIDN.021704860

Mengetahui,

Wakil Ketua I

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M

NIDN.0606118902

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner penelitian

KUESIONER PENELITIAN

“PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN COLOMADU ”

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/I Di Tempat.

Dengan Hormat

Berkenan dalam rangka pelaksanaan penelitian Tugas Akhir Skripsi untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana akuntansi, saya Avita Stevani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang berjudul “ **Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Colomadu**”. Memohon ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk bersedia meluangkan waktu mengisi kuesioner yang terlampir.

Hasil jawaban pada kuesioner Bapak/Ibu/Sdr/I merupakan sumber data bagi penelitian saya, amaka diharapkan Bapak/Ibu/Sdr/I dapat mengisi kuesioner dengan objektif. Seluruh data dan informasi yang diperoleh akan dijamin kerahasiaannya.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Sdr/I dalam menjawab kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.

Identitas Responden

Mohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi identitas dalam kuesioner penelitian secara lengkap (kecuali untuk nama boleh tidak diisi). Setiap pertanyaan dimohon hanya ada satu jawaban guna menjamin validitas data

Jenis kelamin : P / L

Nama :

Usia Saat ini :..... Tahun

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dengan teliti untuk menjawab pertanyaan berikut dengan benar.
2. Berilah jawaban dengan memberikan tanda check list (√) pada kuesioner yang menurut anda paling sesuai.

KETERANGAN

1. Jika jawaban anda “ Sangat Tidak Setuju ” (STS)
2. Jika jawaban anda “ Tidak Setuju” (TS)
3. Jika jawaban anda “ Netral” (N)
4. Jika jawaban anda “Setuju” (S)
5. Jika jawaban anda “ Sangat Setuju” (SS)

Variabel Good Government Governance (X)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
Indikator : Akuntabilitas (X1)						
1	Aparatur Desa membuat keputusan secara tertulis, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku					
2	Aparatur Desa melaksanakan tugas berupa laporan keungan dan program yang dilakukan secara berkala					
3	Aparatur Desa melaksanakan pertanggungjawaban berupa laporan tahunan keuangan dan program yang dilakukan secara berkala.					
4	Aparatur Desa melaksanakan kinerja sesuai jumlah perencanaan, pelaksanaan program dan hasil					
5	pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program organisasi yang telah dilakukan					
indikator : Transparansi (X2)						
1	Aparatur Desa mempublikasikan profile, kegiatan, sarana dan prasarana serta jasa/ pelayanan secara akurat					

2	Aparatur Desa memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan mengakses informasi					
3	Aparatur Desa menyediakan sarana untuk masyarakat mengajukan saran atau keluhan					
4	Aparatur Desa memberikan informasi yang dapat diakses pihak yang berkepentingan baik pihak internal atau pihak eksternal					
indikator: Partispasi (X3)						
1	Aparatur Desa menyediakan forum untuk menampung partisipasi masyarakat melalui media massa atau diskusi publik					
2	Aparatur Desa membuat kebijakan selalu melibatkan masyarakat					
3	Aparatur Desa membuka diri bagi masyarakat untuk memberikan data dan informasi sebagai bahan masukan					

Variabel : Kinerja Pemerintah Desa (Y)

NO	PERNYATAAN	PILIHAN				
		STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Pegawai melaksanakan kinerja berdasarkan prinsip efektivitas dan efisien					
2	pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu					
3	pegawai menghasilkan kinerja yang telah mencapai sasaran yang diinginkan organisasi					
4	pegawai pemerintah desa melakukan pelayanan kepada masyarakat secara cermat, tepat dan cepat					
5	kinerja pegawai melaksanakan kegiatan organisasi sesuai prosedur atau kebijakan yang berlaku					